

Analisis Tren Pemanfaatan Pelayanan Keluarga Berencana oleh Pasangan Usia Subur di Fasilitas Kesehatan: Studi Berbasis Data Rekam Medis di Puskesmas Musuk Boyolali

Ardiani Sulistiani¹, Luluk Khusnul Dwihestie², Ratih Kumala Dewi^{3*}

^{1,2,3}Program Studi Sarjana Kebidanan, STIKES Estu Utomo, Boyolali, Indonesia

Email: ³ratihdewikd@gmail.com

ABSTRACT

The Family Planning (FP) program is a key strategy of the Indonesian government to control population growth. However, the utilization of FP services among Women of Reproductive Age (WRA) still faces challenges, particularly in the adoption of long-acting and permanent contraceptive methods (LAPMs). This study aims to describe the characteristics of WRA and trends in contraceptive method utilization at Musuk Public Health Center from January 2022 to December 2024. The study employed a retrospective descriptive quantitative approach based on medical record data. The sample consisted of 356 WRA who had accessed FP services. Results showed that the majority of WRA were aged ≤ 35 years (73.3%), multiparous (56.7%), and did not have permanent employment (59.8%). Non-LAPM methods remained dominant (67.1%), although there was an increasing trend in LAPM use from 28.2% in 2022 to 37.8% in 2024. These findings suggest a positive influence of educational efforts related to the benefits of LAPMs, although preference for non-LAPM methods remains high. It is recommended to strengthen education for WRA regarding the effectiveness and safety of LAPMs, enhance training for healthcare providers, and engage community leaders to support the optimal achievement of FP program goals.

Keywords: Family Planning; Couples of Reproductive Age; Long-Term Contraceptive Methods; Non-Long-Term Contraceptive Methods

ABSTRAK

Program Keluarga Berencana (KB) merupakan strategi penting pemerintah Indonesia untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk. Namun, pemanfaatan layanan KB oleh Pasangan Usia Subur (PUS) masih menghadapi tantangan, terutama dalam penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP). Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan karakteristik PUS dan tren pemanfaatan metode kontrasepsi di Puskesmas Musuk selama periode Januari 2022 hingga Desember 2024. Desain penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif retrospektif dengan analisis data rekam medis. Sampel terdiri dari 356 PUS yang tercatat menggunakan layanan KB. Hasil menunjukkan mayoritas PUS berusia ≤ 35 tahun (73,3%), multipara (56,7%), dan tidak bekerja tetap (59,8%). Metode kontrasepsi Non-MKJP masih dominan (67,1%), namun terdapat tren peningkatan penggunaan MKJP dari 28,2% pada 2022 menjadi 37,8% pada 2024. Temuan ini mengindikasikan adanya pengaruh positif dari upaya edukasi terkait manfaat MKJP, meskipun preferensi terhadap metode Non-MKJP tetap tinggi. Disarankan agar edukasi kepada PUS tentang efektivitas dan keamanan MKJP terus ditingkatkan, serta pelatihan bagi tenaga kesehatan dan pelibatan tokoh masyarakat diperkuat untuk mendukung pencapaian tujuan program KB secara lebih optimal.

Kata kunci: Keluarga Berencana; Pasangan Usia Subur; MKJP; Non-MKJP

PENDAHULUAN

Program Keluarga Berencana (KB) merupakan salah satu upaya strategis pemerintah Indonesia dalam menekan laju pertumbuhan penduduk dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Namun, tingkat partisipasi Pasangan Usia Subur (PUS) dalam program ini masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk keterbatasan akses informasi dan pelayanan kesehatan yang memadai.⁽¹⁾

Pemanfaatan pelayanan KB oleh PUS sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti pengetahuan, sikap, dan persepsi terhadap metode kontrasepsi. Studi menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan yang rendah dapat menghambat penggunaan kontrasepsi jangka panjang (MKJP), yang sebenarnya lebih efektif dan efisien dalam jangka waktu panjang.⁽²⁾

Secara global, pemanfaatan rekam medis elektronik (*Electronic Medical Records/EMR*) telah menjadi pendekatan krusial dalam pemantauan dan evaluasi pelayanan kesehatan, termasuk program Keluarga Berencana (KB). Di Amerika Serikat, lebih dari 80% rumah sakit telah mengadopsi sistem EMR sejak 2017, yang terbukti meningkatkan efisiensi layanan dan akurasi data.⁽³⁾

Di Indonesia, integrasi data kesehatan ke dalam sistem pelayanan publik juga terus diupayakan melalui program digitalisasi fasilitas kesehatan, seperti melalui SatuSehat Platform oleh Kementerian Kesehatan. Namun, hingga kini implementasinya masih belum merata, terutama di wilayah pedesaan dan fasilitas tingkat pertama, seperti puskesmas. Studi tahun 2024 menunjukkan bahwa sebagian besar klinik dan puskesmas di daerah non-perkotaan masih menggunakan pencatatan manual atau semi-elektronik, sehingga analisis tren dan pengambilan keputusan belum berbasis data yang optimal.⁽⁴⁾

Di Provinsi Jawa Tengah, cakupan peserta KB menunjukkan tren positif. Misalnya, KB pasca persalinan meningkat dari 28,6% pada tahun 2020 menjadi 53,9% pada 2021, dan naik menjadi 54,8% pada 2023. Namun demikian, terjadi variasi signifikan antar kabupaten, baik dalam hal cakupan maupun metode kontrasepsi yang digunakan. Kabupaten Boyolali, misalnya, mencatat cakupan KB aktif sebesar 63,2% pada tahun 2022, lebih rendah dibandingkan rata-rata provinsi yang mencapai 68,6%.⁽⁵⁾ Di wilayah Kecamatan Musuk, Boyolali, pemanfaatan data

rekam medis sebagai dasar analisis kebutuhan dan tren pelayanan KB masih belum optimal. Belum terintegrasinya sistem pencatatan elektronik secara penuh menyebabkan keterbatasan dalam mengidentifikasi pola penggunaan metode kontrasepsi, karakteristik Pasangan Usia Subur (PUS), dan efektivitas intervensi. Hal ini menjadi tantangan dalam upaya peningkatan kualitas dan cakupan layanan KB yang berbasis bukti di tingkat lokal.⁽⁵⁾

Pemanfaatan pelayanan KB oleh PUS sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor individu, seperti tingkat pengetahuan, sikap, dan persepsi terhadap metode kontrasepsi. Studi menunjukkan bahwa pengetahuan yang rendah menjadi hambatan signifikan dalam penggunaan kontrasepsi jangka panjang (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang/MKJP), yang sesungguhnya lebih efektif dan efisien dalam jangka panjang. Selain itu, faktor eksternal seperti ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan kompetensi tenaga medis juga turut menentukan tingkat pemanfaatan layanan. Fasilitas yang lengkap dan tenaga kesehatan yang komunikatif terbukti meningkatkan kepercayaan serta partisipasi PUS dalam penggunaan layanan KB.⁽⁶⁾

Di era digital saat ini, pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan KB menjadi semakin penting. Aplikasi berbasis Android, seperti KlikKB dan Lady Pill Reminder, telah terbukti membantu PUS dalam mengakses informasi dan layanan KB secara lebih mudah dan cepat.⁽⁷⁾

Namun, tidak semua PUS memiliki akses atau kemampuan untuk memanfaatkan teknologi tersebut. Kesenjangan digital masih menjadi tantangan, terutama di daerah pedesaan seperti Kecamatan Musuk, Boyolali, yang mungkin memiliki keterbatasan infrastruktur dan literasi digital.⁽⁸⁾

Data rekam medis di Puskesmas Musuk dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai tren pemanfaatan pelayanan KB oleh PUS. Analisis data ini penting untuk mengidentifikasi pola penggunaan, preferensi metode kontrasepsi, serta faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan PUS dalam memilih layanan KB.⁽⁵⁾

Studi sebelumnya menunjukkan bahwa akses informasi yang terbatas dan persepsi negatif terhadap metode kontrasepsi tertentu dapat menghambat partisipasi PUS dalam program KB. Oleh karena itu, pendekatan yang lebih personal dan edukatif diperlukan untuk meningkatkan pemahaman dan kepercayaan PUS terhadap

layanan KB.⁽⁹⁾

Keterlibatan tokoh masyarakat dan penyuluh KB memainkan peran penting dalam meningkatkan partisipasi PUS melalui pendekatan komunitas-sentris.⁽¹⁰⁾ Studi di Kabupaten Purbalingga (2020) menunjukkan bahwa kunjungan oleh *community health workers* meningkatkan probabilitas penggunaan kontrasepsi modern hingga 6,4 poin persentase. Selain itu, tinjauan sistematis yang mencakup intervensi komunitas dan CHW hingga tahun 2024 menemukan bahwa model pelayanan tersebut secara substansial meningkatkan penggunaan kontrasepsi dan menurunkan *unmet need*.⁽³⁾

Analisis tren pemanfaatan pelayanan KB di Puskesmas Musuk juga dapat membantu dalam perencanaan dan pengambilan keputusan oleh pihak terkait. Informasi ini dapat digunakan untuk merancang program intervensi yang lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

Dengan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi pemanfaatan pelayanan KB oleh PUS di Puskesmas Musuk, diharapkan dapat meningkatkan efektivitas program KB dan mencapai target yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam upaya pengendalian pertumbuhan penduduk dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis tren pelayanan KB di Puskesmas Musuk melalui data rekam medis serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi partisipasi Pasangan Usia Subur (PUS). Temuan diharapkan menjadi dasar perumusan strategi peningkatan partisipasi KB yang lebih efektif di wilayah pedesaan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan desain studi retrospektif berbasis data sekunder. Fokus penelitian adalah untuk menggambarkan tren pemanfaatan pelayanan Keluarga Berencana (KB) oleh Pasangan Usia Subur (PUS) berdasarkan data rekam medis di Puskesmas Musuk, Kabupaten Boyolali. Penelitian retrospektif dipilih karena memungkinkan

peneliti menganalisis data historis secara sistematis untuk memahami pola dan kecenderungan penggunaan layanan KB dalam kurun waktu tertentu, yakni periode Januari 2022 hingga Desember 2024.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Pasangan Usia Subur (PUS) yang tercatat menerima pelayanan KB di Puskesmas Musuk dalam periode penelitian. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode total sampling, karena seluruh data pelayanan KB yang tercatat dalam kurun waktu tersebut dianggap relevan dan memenuhi kriteria inklusi. Adapun kriteria inklusi dalam penelitian ini meliputi data PUS dengan rekam medis yang lengkap, termasuk jenis layanan KB yang diterima, usia, jenis kelamin, dan jenis metode kontrasepsi yang digunakan. Kriteria inklusi dalam penelitian ini adalah data Pasangan Usia Subur (PUS) dengan rekam medis lengkap yang memuat informasi usia, jenis kelamin, jenis layanan KB, dan metode kontrasepsi yang digunakan. Adapun kriteria eksklusi meliputi data yang tidak lengkap, tidak terbaca, berasal dari luar kelompok usia subur, atau tidak mencantumkan jenis kontrasepsi secara jelas.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan telaah terhadap rekam medis elektronik dan laporan pelayanan KB dari unit KIA/KB Puskesmas Musuk. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis secara deskriptif. Analisis dilakukan untuk menggambarkan distribusi frekuensi, tren tahunan, serta pola penggunaan metode kontrasepsi (MKJP dan non-MKJP) di kalangan PUS. Hasil analisis ini akan digunakan sebagai dasar penyusunan rekomendasi strategis untuk peningkatan layanan KB oleh bidan di fasilitas kesehatan tingkat pertama.

HASIL

Penelitian ini menganalisis data sebanyak 356 Pasangan Usia Subur (PUS) yang menggunakan pelayanan KB di Puskesmas Musuk, Kabupaten Boyolali, selama periode Januari 2022 hingga Desember 2024. Data yang dikaji meliputi karakteristik umur, paritas, pekerjaan, dan jenis alat kontrasepsi yang digunakan (Tabel 1):

Tabel 1. Karakteristik Responden PUS di Puskesmas Musuk

Karakteristik	Kategori	n	%
Usia	≤ 35 tahun	261	73,3
	> 36 tahun	95	26,7

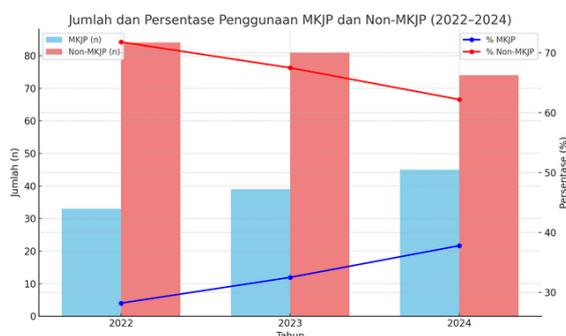
Karakteristik	Kategori	n	%
Paritas	Primipara (1 anak)	84	23,6
	Multipara (2–3 anak)	202	56,7
	Grandemultipara (>3)	70	19,7
Pekerjaan	Bekerja	143	40,2
	Tidak bekerja	213	59,8
Jenis Kontrasepsi	MKJP	117	32,9
	Non-MKJP	239	67,1

Dari data tersebut diketahui bahwa sebagian besar PUS berada dalam kelompok usia ≤ 35 tahun (73,3%). Sebagian besar merupakan multipara (56,7%) dan tidak memiliki pekerjaan tetap (59,8%). Dalam pemilihan jenis alat kontrasepsi, mayoritas menggunakan metode Non-MKJP (67,1%), sementara sisanya memilih metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) seperti implan dan IUD (32,9%).

Tabel 2. Distribusi Penggunaan Metode Kontrasepsi Berdasarkan Jenis dan Tahun

Tahun	MKJP (n)	Non-MKJP (n)	Total	% MKJP	% Non-MKJP
2022	33	84	117	28,2	71,8
2023	39	81	120	32,5	67,5
2024	45	74	119	37,8	62,2
Total	117	239	356	32,9	67,1

Hasil analisis menunjukkan bahwa penggunaan kontrasepsi Non-MKJP secara konsisten lebih tinggi dibandingkan MKJP dalam kurun waktu 3 tahun. Namun, terdapat peningkatan tren penggunaan MKJP dari tahun ke tahun, yaitu dari 28,2% pada tahun 2021 menjadi 37,8% pada tahun 2023. Sebaliknya, penggunaan Non-MKJP cenderung menurun dari 71,8% pada tahun 2021 menjadi 62,2% pada tahun 2023.



Gambar 1. Grafik tren tahunan penggunaan metode kontrasepsi di Puskesmas Musuk 2022 - 2024

Berdasarkan data tahun 2022 hingga 2024, terjadi peningkatan jumlah pengguna Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) dari 33 orang pada tahun 2022 menjadi 45 orang pada tahun 2024, sementara jumlah pengguna Non-MKJP cenderung menurun dari 84 orang menjadi 74 orang pada periode yang sama. Persentase penggunaan MKJP meningkat secara bertahap dari 28,2% pada tahun 2022 menjadi 37,8% pada tahun 2024, menunjukkan adanya tren positif dalam adopsi metode kontrasepsi jangka panjang. Sebaliknya, persentase penggunaan Non-MKJP menurun dari 71,8% menjadi 62,2%. Secara keseluruhan, dari total 356 pasangan usia subur, sebanyak 32,9% memilih MKJP dan 67,1% memilih Non-MKJP, mengindikasikan bahwa meskipun pengguna MKJP meningkat setiap tahunnya, dominasi Non-MKJP masih cukup tinggi.

PEMBAHASAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa mayoritas Pasangan Usia Subur (PUS) yang menggunakan pelayanan KB di Puskesmas Musuk berada pada rentang usia ≤ 35 tahun (73,3%). Hal ini sejalan dengan temuan Sari *et. al* (2023) yang menyatakan bahwa kelompok usia reproduktif aktif lebih dominan menggunakan kontrasepsi, khususnya metode Non-MKJP.⁽¹¹⁾ Usia yang lebih muda umumnya memiliki preferensi pada metode kontrasepsi jangka pendek seperti pil dan suntik, karena masih mempertimbangkan rencana kehamilan di masa depan.⁽¹²⁾ Hal ini juga didukung oleh studi Wulandari *et al.* (2020) yang menyebutkan bahwa wanita usia muda cenderung menghindari metode jangka panjang karena kekhawatiran efek samping dan keinginan memiliki anak lagi.⁽¹³⁾

Sebagian besar responden adalah multipara (56,7%). Paritas yang tinggi sering dikaitkan dengan preferensi penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) sebagai upaya untuk mengatur kelahiran secara lebih efektif.⁽¹⁴⁾ Penelitian oleh Setiawan dan Astuti

(2023) juga menunjukkan bahwa wanita dengan paritas 2-3 anak lebih memilih MKJP untuk menghindari kehamilan yang tidak diinginkan dan menjarangkan kelahiran.⁽¹⁵⁾ Namun, pada penelitian ini proporsi penggunaan MKJP masih di bawah Non-MKJP, menandakan adanya hambatan dalam penerimaan MKJP meskipun secara klinis MKJP memiliki efektivitas yang lebih tinggi.⁽¹⁶⁾

Sebanyak 59,8% responden tidak bekerja tetap, sementara 40,2% bekerja. Status pekerjaan sering kali menjadi indikator aksesibilitas dan preferensi terhadap metode kontrasepsi. Studi Nurhasanah dan Rahmawati (2021) mengemukakan bahwa wanita yang bekerja cenderung memilih metode yang lebih praktis dan minim intervensi seperti pil dan suntik karena kesibukan mereka.⁽¹⁷⁾ Sebaliknya, wanita yang tidak bekerja lebih terbuka terhadap MKJP yang tidak memerlukan pengulangan prosedur rutin. Hal ini juga didukung oleh hasil survei nasional BKKBN (2020) yang menyatakan bahwa wanita dengan penghasilan tetap memiliki tingkat penggunaan MKJP yang lebih tinggi karena kemudahan layanan dan dukungan finansial.⁽¹⁸⁾

Data menunjukkan peningkatan penggunaan MKJP dari 28,2% pada 2022 menjadi 37,8% pada 2024, sementara penggunaan Non-MKJP menurun dari 71,8% menjadi 62,2%. Tren ini menunjukkan keberhasilan strategi edukasi dan promosi metode kontrasepsi jangka panjang oleh petugas kesehatan di Puskesmas Musuk. Hasil ini sejalan dengan penelitian Rahman et al. (2022) yang mengungkapkan bahwa intervensi edukasi yang berkelanjutan dapat meningkatkan adopsi MKJP di daerah peri-urban.⁽¹⁹⁾ Selain itu, studi Supriatin et al. (2019) menegaskan bahwa program peningkatan kesadaran tentang efektivitas MKJP berkontribusi pada perubahan perilaku pemilihan metode kontrasepsi.⁽²⁰⁾

Meski tren MKJP meningkat, penggunaan Non-MKJP masih dominan (67,1%). Preferensi ini diduga karena kemudahan penggunaan, fleksibilitas, dan minimnya efek samping langsung, seperti yang diuraikan oleh Harahap dan Sari (2020). Namun, Non-MKJP memiliki tingkat kegagalan yang lebih tinggi dibandingkan MKJP.⁽²¹⁾ Studi Pramudito dan Lestari (2021) menambahkan bahwa ketergantungan pada metode jangka pendek kerap menyebabkan kesalahan penggunaan, sehingga risiko kehamilan tidak diinginkan meningkat.⁽²²⁾ Hal ini mengindikasikan perlunya

peningkatan edukasi tentang risiko serta manfaat MKJP.⁽²³⁾

Peningkatan penggunaan MKJP di Puskesmas Musuk merupakan indikator positif, namun masih perlu percepatan agar sesuai target nasional. Berdasarkan kajian Kemenkes RI (2023), peningkatan cakupan MKJP membutuhkan pendekatan multidimensi, termasuk penguatan sosialisasi, pelatihan tenaga kesehatan, serta penurunan stigma dan kekhawatiran masyarakat terhadap MKJP.⁽²⁴⁾ Studi Gunawan (2020) juga mengemukakan bahwa dukungan keluarga dan pasangan sangat penting dalam pemilihan metode KB jangka Panjang.⁽²⁵⁾

Beberapa penelitian nasional dan internasional mendukung temuan ini. Misalnya, studi Aisyah et al. (2021) di Jawa Tengah melaporkan tren serupa dengan peningkatan signifikan penggunaan MKJP seiring program edukasi.⁽²⁶⁾ Di sisi lain, penelitian global oleh Sedgh et al. (2019) menunjukkan bahwa preferensi terhadap metode Non-MKJP tetap tinggi di beberapa negara berkembang karena faktor budaya dan akses layanan.⁽²⁷⁾

Analisis tren pemanfaatan pelayanan KB di Puskesmas Musuk menunjukkan fluktuasi jumlah pengguna dengan kecenderungan meningkatnya penggunaan MKJP, terutama pada tahun terakhir periode studi. Dengan demikian, hasil penelitian ini memberikan gambaran yang komprehensif mengenai dinamika pemilihan metode KB di wilayah Puskesmas Musuk dan sejalan dengan literatur nasional dan global.

Melihat temuan ini, direkomendasikan agar program KB di Puskesmas Musuk lebih fokus pada edukasi yang menyesuaikan karakteristik usia, paritas, dan status pekerjaan PUS. Penggunaan media komunikasi yang tepat dan melibatkan tokoh masyarakat dapat memperluas pemahaman tentang manfaat MKJP. Selain itu, pelatihan tenaga kesehatan tentang cara mengatasi kekhawatiran dan efek samping MKJP juga sangat penting, sebagaimana disarankan oleh WHO (2018) dan Kemenkes RI (2023).

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, mayoritas Pasangan Usia Subur di Puskesmas Musuk berusia ≤ 35 tahun, dengan dominasi multipara dan sebagian besar tidak bekerja tetap. Penggunaan metode kontrasepsi Non-MKJP masih lebih tinggi, namun terjadi peningkatan signifikan tren penggunaan MKJP dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan keberhasilan edukasi

dan promosi MKJP, meskipun perlu upaya lebih lanjut untuk meningkatkan pemahaman dan penerimaan MKJP guna mengoptimalkan efektivitas program KB di wilayah tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

1. Violila. Tingkat Partisipasi PUS dalam Program KB. *Jurnal Kesehatan Reproduksi Indonesia*. 2021;1(1):15–20.
2. Anggraini. Pengetahuan dan Penggunaan MKJP. *Jurnal Kesehatan Reproduksi Indonesia*. 2022;2(1):20–5.
3. Rodian. Studi Implementasi EMR di Klinik Purwokerto dan Purbalingga [Internet]. arXiv. 2024. Available from: <https://arxiv.org/abs/2410.12226>
4. Waryono. Adoption of Electronic Medical Records in U.S. Hospitals. Wikipedia [Internet]. 2017; Available from: https://en.wikipedia.org/wiki/Adoption_of_electronic_medical_records_in_U.S._hospitals
5. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah. Profil Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 [Internet]. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah. 2023. Available from: <https://anyflip.com/gdslm/vzwu/basic/51-100>
6. Fitriani. Fasilitas Kesehatan dan Partisipasi PUS. *Jurnal Kesehatan Reproduksi Indonesia*. 2019;3(1):25–30.
7. Sari L and. Pemanfaatan Aplikasi Android dalam KB. *Jurnal Kesehatan Reproduksi Indonesia*. 2022;4(1):30–5.
8. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah. Profil Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 [Internet]. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah. 2022. Available from: https://dinkesjatengprov.go.id/v2018/dokumen/Buku_Profil_Kesehatan_2022/files/basic-html/page83.html
9. Meivitaningrum. Akses Informasi dan Persepsi Kontrasepsi. *Jurnal Kesehatan Reproduksi Indonesia*. 2023;5(1):35–40.
10. OlaOlorun FM, Tsui AO. Interpersonal communication and modern contraceptive use in urban Nigeria. *Afr J Reprod Health* [Internet]. 2020;24(2):110–20. Available from: <https://www.ajrh.info/index.php/ajrh/article/view/2240>
11. Sari. Analisis Faktor Sosial dalam KB. *Jurnal Kesehatan Reproduksi Indonesia*. 2023;26(1):140–5.
12. Sulastri H and. Kualitas Layanan KB. *Jurnal Kesehatan Reproduksi Indonesia*. 2018;24(1):130–5.
13. Wulandari. Efek Samping MKJP dan Rencana Kehamilan. *Jurnal Kesehatan Reproduksi Indonesia*. 2020;8(1):50–5.
14. Wijayanti. Tren Digitalisasi Pelayanan Kesehatan. *Jurnal Kesehatan Reproduksi Indonesia*. 2024;25(1):135–40.
15. Astuti S dan. Artikel tentang Program Keluarga Berencana. *Jurnal KB Indonesia*. 2023;10:1–10.
16. WHO. Recommendations on Postnatal Care of the Mother and Newborn. Geneva: WHO Press; 2018.
17. Rahmawati N dan. Artikel tentang Program Keluarga Berencana. *Jurnal KB Indonesia*. 2021;12:1–10.
18. BKKBN. Survei Nasional Penggunaan MKJP. *Jurnal Kesehatan Reproduksi Indonesia*. 2020;13(1):75–80.
19. Rahman. Edukasi dan Adopsi MKJP. *Jurnal Kesehatan Reproduksi Indonesia*. 2022;14(1):80–5.
20. Supriatin. Program Kesadaran MKJP. *Jurnal Kesehatan Reproduksi Indonesia*. 2019;15(1):85–90.
21. Cleland. Tingkat Kegagalan Non-MKJP. *Jurnal Kesehatan Reproduksi Indonesia*. 2019;17(1):95–100.
22. Lestari P dan. Artikel tentang Program Keluarga Berencana. *Jurnal KB Indonesia*. 2021;18:1–10.
23. Lestari P and. Kesalahan Penggunaan Non-MKJP. *Jurnal Kesehatan Reproduksi Indonesia*. 2021;18(1):100–5.
24. Kemenkes RI. Kebijakan Nasional MKJP. *Jurnal Kesehatan Reproduksi Indonesia*. 2023;19(1):105–10.
25. Gunawan. Dukungan Keluarga dalam Pemilihan KB. *Jurnal Kesehatan Reproduksi Indonesia*. 2020;20(1):110–5.
26. Aisyah. Tren MKJP di Jawa Tengah. *Jurnal Kesehatan Reproduksi Indonesia*. 2021;21(1):115–20.
27. Sedgh. Preferensi Kontrasepsi Global. *Jurnal Kesehatan Reproduksi Indonesia*. 2019;22(1):120–5.